RBKUNWAS

panrb
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

PELAKSANAAN EVALUASI SAKIP-RB-ZI TAHUN 2021

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan

Evaluasi SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Evaluasi SAKIP

Permenpanrb 12/2015

TUJUAN EVALUASI

- menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil *(outcome)* terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil *(result oriented government)*
- memberikan saran perbaikan yang diperlukan

PELAKSANA EVALUASI

- Pelaksanaan evaluasi Tahun 2021 seluruhnya dilakukan oleh Deputi RB Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB

METODE EVALUASI

Desk Evaluation

Evaluasi dilakukan dengan menganalisis seluruh dokumen atas penerapan SAKIP yang telah disampaikan oleh instansi pemerintah kepada Kementerian PANRB melalui ESR.menpan.go.id

In - Depth interview by ZOOM

Evaluasi mendalam bertujuan untuk memastikan penerapan sakip telah dilakukan dengan baik pada unit kerja/Organisasi perangkat Daerah. Pendalaman dilakukan secara sampling berdasarkan hasil *desk evaluation*, dengan memperhatikan core bisnis instansi dan program prioritas (missal: KSPN)

OBJEK EVALUASI

- Seluruh instansi pemerintah yang meliputi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah yang telah menyampaikan dokumen SAKIP melalui aplikasi ESR, minimal berupa laporan kinerja/LKJIP

PERKEMBANGAN PENYAMPAIAN DOKUMEN SAKIP

Instansi Pemerintah	Jumlah Instansi Pemerintah	telah menyampaikan LKjIP Tahun 2020	Belum menyampaikan LKjIP 2020	%
KEMENTERIAN/LEMBAGA	89	86	3	96,63%
PROVINSI	34	34	0	100,00%
KAB/KOTA	508	471	37	92,72%
TOTAL	**631**	**591**	**40**	**93,66%**

*data per 16 Agustus 2021

Apa yang perlu dipersiapkan?

IP perlu melakukan update atau memastikan bahwa seluruh dokumen penerapan SAKIP terutama dokumen perencanaan telah disubmit pada apliksi esr.menpan.go.id

Data-data yang perlu ditambahkan seperti data pohon kinerja, data refocusing program-kegiatan, dan data capaian kinerja/outcome IP (mis: angka kemiskinan, angka pengangguran terbuka, harapan hidup, dsb dan berbagai prestasi/reward yang diterima oleh IP, dapat disampaikan melalui, *google drive, cloud, atau dropbox* kepada evaluator

Apabila IP memiliki aplikasi terkait implementasi SAKIP, baik perencanaan dan monev dapat menyampaikan *link* atau memberikan akses kepada evaluator untuk meninjau.

FOKUS EVALUASI SAKIP dan SAMPLE UNIT KERJA

Efektifitas penggunaan APBN/APBD di sektor prioritas khususnya Pemulihan kesehatan dan ekonomi akibat dampak covid-19

Refocusing program-kegiatan yang tidak berdampak bagi pencapaian sasaran

Fokus Evaluasi SAKIP

Sampel Unit kerja

PEMDA

- Urusan penanaman modal
- Urusan sosial
- Urusan ketenagakerjaan
- Urusan kesehatan
- Urusan Industri, Perdagangan, KUKM
- Urusan Pekerjaan umum
- Urusan Kominfo
- 3 PD terkait isu strategis Pemda

K/L

- Setiap K/LSample 4 unit kerja
- Unit kerja fungsi dukungan tidak diprioritaskan
- Pemilihan sample disesuaikan dengan isu strategis terkait core business dan PEN
- IP yang mengalami penggabungan, obyek evaluasi adalah instansi setelah penggabungan

Evaluasi RB

Implementasi Reformasi Birokrasi

Evaluasi RB

Permenpanrb 26/2020

TUJUAN EVALUASI

- Menilai kemajuan pelaksanaan RB dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien, dan mampu memberikan pelayanan publik yang baik.
- Memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi

PELAKSANA EVALUASI

- Pelaksanaan evaluasi RB Tahun 2021 dilakukan secara bersama oleh seluruh unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian PANRB yang terkait dengan 8 area perubahan reformasi birokrasi.

METODE EVALUASI

Desk Evaluation

Evaluasi dilakukan dengan menganalisis seluruh dokumen atas pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah disampaikan oleh instansi pemerintah kepada Kementerian PANRB melalui aplikasi PMPRB.menpan.go.id

In - Depth interview by ZOOM

Evaluasi mendalam bertujuan untuk memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi telah dilakukan dengan baik pada tingkat instansi dan unit kerja/Organisasi perangkat Daerah. Pendalaman dilakukan secara sampling berdasarkan hasil *desk evaluation*, dengan memperhatikan core bisnis instansi dan program prioritas nasional

OBJEK EVALUASI

Seluruh instansi pemerintah yang meliputi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah yang telah melakukan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui aplikasi PMPRB-online dan dievaluasi

88 Pemda yang belum mengisi PMPRB

No	Provinsi	Kab/Kota
1	Aceh	6
2	Sumatera Utara	7
3	Sumatera Selatan	1
4	Lampung	2
5	NTT	12
6	Kalimantan Tengah	1
7	Sulawesi Utara	5
8	Sulawesi Tengah	2
9	Sulawesi Tenggara	2
10	Sulawesi Barat	1
11	Maluku	8
12	Maluku utara	8
13	Papua	25
14	Papua Barat	8

PERKEMBANGAN IP YANG TELAH MELAKUKAN PMPRB

Instansi Pemerintah	Jumlah Instansi Pemerintah	IP telah melakukan PMPRB		IP Tidak/ Belum melakukan PMPRB
		Jumlah	%	
KEMENTERIAN/LEMBAGA	89	84	94%	5
PROVINSI	34	34	100%	-
KAB/KOTA	508	420	83%	88
TOTAL	**631**	**538**	**85%**	**93**

Data per Tanggal 02 Agustus 2021 Jam 22:30)

5 K/L yang belum mengisi PMPRB

1. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
2. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
3. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
4. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura -> dibubarkan (Perpres 112/20205)
5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Apa yang perlu dipersiapkan?

Update bukti dukung evaluasi dapat disampaikan melalui link *google drive,cloud, atau dropbox* kepada evaluator

- Pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dalam tahun 2021 sepenuhnya akan menggunakan data hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh KPK;
- Pengukuran Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) akan dilakukan dengan menggunakan aplikasi SHRBZSI dengan penyesuaian yang mengaju pada Permenpan 14/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
- Secara substansial survei internal RB tentang integritas jabatan sudah masuk dalam SPI yang dilakukan oleh KPK, sehingga tidak dilakukan lagi
- Bobot hasil SPI akan disesuiakan

Koordinasi dengan instansi yang melakukan pengukuran hasil antara

FOKUS EVALUASI SAKIP dan SAMPLE UNIT KERJA

- Penyederhanaan Birokrasi
- Inovasi dalam pelayanan publik, manajemen sdm, dan Pengawasan
- Tindak lanjut perbaikan peraturan/kebijakan yang dianggap menghambat investasi

PEMDA	K/L
Urusan penanaman modal	Setiap K/LSample 4 unit kerja
Urusan sosial	
Urusan ketenagakerjaan	Unit kerja fungsi dukungan tidak diprioritaskan
Urusan kesehatan	
Urusan Industri, Perdagangan, KUKM	Pemilihan sample disesuaikan dengan isu strategis terkait core business dan PEN
Urusan Pekerjaan umum	
Urusan Kominfo	IP yang mengalami penggabungan, obyek evaluasi adalah instansi setelah penggabungan
3 PD terkait isu strategis Pemda	

Komponen Hasil dan Sub komponen Hasil antara RB

Survei Penilaian Integritas (KPK)	Predikat SAKIP (KemenPANRB)	Indeks Pelayanan Publik (KemenPANB)	Opini Laporan Keuangan (BPK)
Kapabilitas APIP (BPKP)	Indeks Pengawasan Kearsipan (ANRI)	Indeks SPBE (KemenPANRB)	Indeks Profesionalitas ASN (BKN)
Maturitas SPIP (BPKP)	Kepatuhan Pelayanan Publik (ORI)	Indeks Pengelolaan Keuangan (Kemenkeu)	Indeks Kualitas PBJ (LKPP)
Indeks Tata kelola manajemen SDM (BKKBN)	Indeks Pemerintahan Daerah (Kemendagri)	Indeks kepemimpinan perubahan	Indeks Sistem Merit (KASN)

Pengambilan data hasil antara dikoordinasikan oleh Deputi RBKUWAS kepada Kementerian/Lembaga yang menjadi leading sector program meso reformasi birokrasi.

TIMELINE EVALUASI SAKIP DAN RB

Entry meeting
18 Agustus 2021

Evaluation
18 Agustus – 19 Oktober 2021

Exit meeting
Minggu ke-4 Oktober 2021

Reporting
Minggu ke-3 Desember 2021

Evaluasi ZI

Menuju Predikat WBK/WBBM

Permenpanrb 10/2019

Evaluasi ZI

TUJUAN EVALUASI

- menilai dan memberikan saran perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas, agar dapat mewujudkan unit kerja yang bersih dan bebas dari praktek KKN, serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya

PELAKSANA EVALUASI

- Pelaksanaan evaluasi Tahun 2021, dilakukan oleh Kementerian PANRB dengan melibatkan Tim Penilai Internal (TPI), terutama bagi instansi pemerintah yang mengajukan lebih dari 50 unit kerja yang diusulkan.

METODE EVALUASI

- **Tahap I**

  Seleksi administrasi berdasarkan kecukupan syarat pengajuan sesuai PermenPANRB No. 10 Tahun 2019, termasuk kecukupan data dan bukti dukung

- **Tahap II**
  - *Clearance* dari instansi terkait: KPK, ORI, Kompolnas, Komisi Kejaksaaan, saber pungli, bareskrim (lapas narkoba), BNN, Komisi Yudisial, SPANLAPOR!, BPK (tinjut temuan)
  - Seleksi kecukupan hasil survei eksternal

- **Tahap III**

  Pendalaman evaluasi melalui presentasi virtual (via Zoom), video profil, Informasi lainnya dari berita, medsos, dll.

- **Tahap IV**

  Hasil validasi survey (telesurvei)

- **Tahap V**

  Panel

OBJEK EVALUASI

Seluruh unit kerja yang diusulkan oleh instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah) yang telah diajukan melalui aplikasi aplikasi PMPZI-online

UNIT KERJA YANG DIUSULKAN UNTUK MENDAPAT PREDIKAT WBK/WBBM

Instansi Pemerintah	Jumlah IP	IP yang mengusulkan ZI	Jumlah Unit yang diusulkan
KEMENTERIAN/LEMBAGA	89	71	3.407
PROVINSI	34	20	169
KAB/KOTA	508	152	755
TOTAL	**631**	**243**	**4.331**

Data per Tanggal 02 Agustus 2021 Jam 22:30)

14 instansi mengajukan lebih dari 50 Unit kerja, dengan jumlah 2.451 atau 56% dari total yang diajukan tahun 2021

Nama Instansi	Jumlah Unit Diusulkan di Surat
Kepolisian Negara RI	496
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	476
Kejaksaan Agung	365
Kementerian Keuangan	354
Mahkamah Agung RI	314
Badan Pusat Statistik	200
Tentara Nasional Indonesia	121
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	93
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	84
Kementerian Perhubungan	78
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	57
Kementerian Dalam Negeri	57
Pemerintah Kab. Lamongan	56
Kementerian Agama	54

Apa yang perlu dipersiapkan?

Update bukti dukung evaluasi dapat disampaikan melalui link *google drive,cloud, atau dropbox* kepada evaluator

Link video pembangunan ZI 2021

- Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dalam tahun 2021 dilakukan menggunakan SHPRBZI;
- Pengukuran Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) akan dilakukan dengan menggunakan aplikasi SHRBZSI dengan penyesuaian yang mengaju pada Permenpan 14/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Timeline Evaluasi ZI

Evaluation

- Minggu kedua Oktober – Minggu keempat November

Panel

- Minggu keempat November- minggu pertama Desember

Reporting

- Minggu kedua Desember

Terima kasih